

**IRAN DAN POLEMIK JCPOA: KESEPAKATAN, IMPLEMENTASI, DAN  
PELANGGARAN NUKLIR**



**Oleh:**

**Hoirun Nisa**

**19200020235**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Master of Arts (M.A)**

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies**

**Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirun Nisa, S. IP

NIM : 19200010135

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Hoirun Nisa, S. IP

19200010135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hoirun Nisa, S. IP  
NIM : 19200010135  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Hoirun Nisa, S. IP  
19200010135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : Iran dan Polemik JCPOA: Kesepakatan, Implementasi, dan Pelanggaran Nuklir  
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HOIRUN NISA, S.IP  
Nomor Induk Mahasiswa : 19200010135  
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Ja'far Assagaf, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65af023dbeed3



Penguji II  
Mohammad Yunus, Lc., M.A., Ph.D  
SIGNED

Valid ID: 659f95c97a1c6



Penguji III  
Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.  
SIGNED

Valid ID: 65ae6b1fd4901



Yogyakarta, 03 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana  
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 65af5c303eece

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IRAN DAN POLEMIK JCPOA: KESEPAKATAN, IMPLEMENTASI, DAN PELANGGARAN NUKLIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : Hoirun Nisa  
NIM : 19200010135  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A.)

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.*

Yogyakarta, 14 Desember 2023

Pembimbing

  
Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D

## ABSTRAK

*Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* merupakan sebuah perjanjian nuklir yang ditandatangani oleh Iran dan negara-negara P5+1 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, dan Jerman) pada 14 Juli 2015. Tujuan utama terbentuknya kesepakatan tersebut ialah mengatur program nuklir Iran dengan mengurangi kapabilitasnya dengan harapan mencegah pengembangan senjata nuklir. Kemudian, sebagai imbalannya Iran akan terbebas dari sanksi ekonomi internasional. Namun setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut pada Mei 2018, sanksi ekonomi yang kuat diberlakukan kembali kepada Iran. Ini mengakibatkan ketegangan besar di antara Iran dan negara-negara lain yang tetap mempertahankan kesepakatan, khususnya negara-negara Eropa. Sejak itu, Iran mulai melanggar beberapa klausul JCPOA pada tahun 2019 dengan meningkatkan produksi uranium rendah dan tinggi serta melampaui batasan stok bahan bakar nuklir yang disepakati dalam kesepakatan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian terkait keberlanjutan JCPOA serta menimbulkan tekanan pada negara-negara lain yang terlibat dalam kesepakatan untuk mencari solusi guna mempertahankan perjanjian ini.

Berdasarkan persoalan tersebut, tesis ini akan mendiskusikan secara komprehensif tentang alasan Iran melanggar JCPOA pada tahun 2019. Dengan meminjam teori dari Richard C. Snyder, H.W Bruck, dan Burton Sapin tentang *Decision Making Process*, penulis menemukan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi Iran melanggar kesepakatan tersebut, yaitu: *Pertama*, kondisi ekonomi. Pasca Amerika Serikat keluar dari JCPOA dan memberlakukan sanksi yang lebih keras terhadap Iran, ekonomi Iran mengalami dampak yang signifikan, termasuk melemahnya mata uang, inflasi yang meningkat, sulitnya akses ke pasar global, serta penurunan investasi asing. *Kedua*, dukungan masyarakat. Selain berdampak pada kondisi ekonomi domestik, hal ini juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Iran terhadap kelanjutan JCPOA. Akibatnya, mayoritas diantara mereka mendukung pemerintah untuk keluar dari kesepakatan tersebut. *Ketiga*, kebijakan Donald Trump. Masa depan JCPOA semakin tidak jelas, setelah Trump menarik negaranya secara sepihak dari kesepakatan tersebut. Namun meskipun demikian, Iran tetap berusaha mempertahankan status keanggotaannya dalam kesepakatan tersebut. *Keempat*, ketidakefektifan Uni Eropa dalam menyelesaikan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Selama persoalan tersebut terjadi, Uni Eropa telah melakukan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni penggunaan bank sentral, *special purpose vehicle*, serta *instrument in support of trade exchanges*. Namun semua itu, tidak dapat terealisasi secara efektif, sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap Iran.

**Kata kunci:** JCPOA, Kesepakatan, Implementasi, dan Pelanggaran

## **ABSTRACT**

*The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) is a nuclear agreement signed by Iran and the P5+1 countries (United States, United Kingdom, France, Russia, China, and Germany) on July 14, 2015. The main objective of this agreement is to regulate Iran's nuclear program by reducing its nuclear capabilities in the hope of preventing the development of nuclear weapons. In return, Iran would be relieved from international economic sanctions. However, after the United States withdrew from the agreement in May 2018, strong economic sanctions were reimposed on Iran. This led to significant tensions between Iran and other countries that remained committed to the agreement, especially European nations. Since then, Iran began violating some clauses of the JCPOA in 2019 by increasing the production of low and high enriched uranium and surpassing the agreed-upon limits of nuclear fuel stockpiles. This has caused uncertainty regarding the sustainability of the JCPOA and has put pressure on other involved countries to find a solution to uphold the agreement.*

*Based on these issues, this thesis will comprehensively discuss the reasons why Iran violated the JCPOA in 2019. Borrowing theories from Richard C. Snyder, H.W. Bruck, and Burton Sapin regarding the Decision-Making Process, the author finds that there are four factors influencing Iran's breach of the agreement. Firstly, economic conditions. Following the U.S. withdrawal from the JCPOA and the imposition of harsher sanctions on Iran, Iran's economy suffered significant impacts, including currency depreciation, increased inflation, difficulties accessing global markets, and a decrease in foreign investment. Secondly, public support. Besides impacting domestic economic conditions, this also affected the level of trust among the Iranian population regarding the continuity of the JCPOA. Consequently, the majority of them supported the government's decision to exit the agreement. Thirdly, Donald Trump's policies. The future of the JCPOA became increasingly uncertain after Trump unilaterally withdrew the United States from the agreement. However, despite this, Iran attempted to maintain its membership status in the agreement. Fourthly, the ineffectiveness of the European Union in resolving U.S. sanctions against Iran. During this issue, the EU took several steps to address the problem, such as using central banks, special purpose vehicles, and instruments in support of trade exchanges. However, none of these measures were effectively realized, leading to disappointment for Iran.*

**Keyword: JCPOA, Agreement, Implementation, and Violation**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, setelah bertahun-tahun melakukan penelitian dan bergelut dengan berbagai literatur, pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Terbentuknya tesis ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan banyak pihak, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pertama, saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Prof. Al Makin, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S. Ag, selaku Diresktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta; serta Dr. Nina Mariani Noor, M.A, selaku ketua jurusan *Interdisciplinary Islamic Studies* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mohammad Yunus, Lc., MA., Ph.D, selaku dosen pembimbing tesis saya. Atas kritik dan masukan beliau, tesis ini layak diujikan serta dibaca oleh semua orang nantinya.

Saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Mas Aflah Misbah dan Ustadz Firmada Taufiq, salah satu alumni IIS yang banyak menginspirasi saya agar terus membaca literatur ilmiah berbahasa asing dan melatih kemampuan menulis saya.

Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para dosen UIN Sunan kalijaga, khususnya Pascasarjana Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk meningkatkan kemampuan akademik. Terkhusus kepada beberapa dosen



yang telah memberi saya masukan dan berbagai pengalaman tentang cara menulis ilmiah yang baik pada masa perkuliahan berlangsung seperti Bapak Dicky Sofjan, Alm. Bapak Faisal Ismail, Bapak Ibnu Burdah, Bapak Ahmad Rafiq, Bapak Najib Kailani, Prof. Machasin, Bapak Subaidi, dan beberapa dosen lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu disini.

Paling utama, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu saya yang telah memberi banyak kepercayaan, pendanaan, dan doa selama saya menempuh S2 di UIN Sunan Kalijaga.

Terima kasih juga saya haturkan kepada teman-temanku tersayang seperti Tete Lili dan Beb Ika. Tanpa kehadiran mereka semua, kegelisahan dan kebingungan saya selama menulis tesis mungkin sulit berkurang. Canda tawa mereka banyak membantu saya untuk menjalani beban ilmiah yang sangat sulit ini.

Yogyakarta, 9 April 2023

Penulis



Hoirun Nisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada keluarga saya  
Terhusus kepada Bapak saya Masyhuri dan Ibu saya Siti Khotijah  
Terima kasih, kalian adalah panutan bagi saya



## MOTTO

*“Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan menanggung pahitnya kebodohan”*

(Imam Syafi’i)



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASILAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
HALAMAN MOTTO .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoritis .....	16
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	23

## **BAB II FAKTOR IRAN MENANDATANGANI JCPOA**

A. Perubahan Kepemimpinan .....	29
B. Masalah Ekonomi .....	34
C. Dukungan negara-negara P5+1 .....	44
<b>BAB II IMPLEMENTASI IRAN TERHADAP JCPOA: TANTANGAN DAN PELUANG</b>	
A. Rencana Implementasi JCPOA .....	56
B. Tantangan Iran selama Implementasi JCPOA .....	62
C. Peluang Iran Meningkatkan Kembali Kemampuan Nuklir.....	75
<b>BAB IV ANALISIS <i>DECISION MAKING PROCESS</i> TERHADAP PELANGGARAN IRAN DALAM KESEPAKATAN JCPOA</b>	
A. Kondisi Ekonomi .....	82
B. Dukungan Masyarakat .....	86
C. Kebijakan Donald Trump.....	89
D. Ketidakefektifan Uni Eropa dalam Menyelesaikan Sanksi Amerika Serikat terhadap Iran .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Teori <i>Decision Making Process</i> .....	17
Gambar 2: GDP Per Capita Iran Tahun 1980-2014 .....	27
Gambar 3: Produksi dan Ekspor Minyak Mentah Iran .....	84
Gambar 4: Pendapat Masyarakat Iran terhadap Situasi Ekonomi .....	85
Gambar 5: Pendapat Masyarakat Iran tentang Pelaksanaan Kewajiban Negara P5+1 .....	87
Gambar 6: Pendapat Masyarakat Iran tentang Kelanjutan JCPOA .....	88



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Timur Tengah merupakan salah satu wilayah yang paling strategis dan memainkan peran penting dalam dinamika politik global. Ketegangan yang terjadi di wilayah ini selalu berdampak langsung pada wilayah sekitarnya, yang tidak terlepas dari posisi geografis Timur Tengah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Para sarjana telah membangun sejumlah argumen untuk menjelaskan pentingnya Timur Tengah dari berbagai sudut, termasuk geografis, ekonomis, dan ideologis.

Dalam analisisnya, Simon Bromley menyoroti dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk memahami dinamika politik di Timur Tengah. Pertama, dari segi internal, keberadaan Islam sebagai agama turut serta menjelaskan identitas politik wilayah tersebut. Peristiwa politik selalu dikaitkan langsung dengan Islam, diikuti oleh legitimasi lain seperti etnisitas Arab. Sebagai konsekuensinya, Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme selalu relevan untuk menjelaskan peristiwa politik dari era 1950, 1960, 1979, hingga Revolusi Arab Spring 2011<sup>1</sup>. Kedua, dari segi eksternal, sumber daya alam, terutama minyak, menjadi alasan penting mengapa Barat tertarik pada wilayah ini. Industrialisasi di negara-negara Barat mendorong

---

<sup>1</sup> T Ramadan, *The Arab Awakening: Islam and the New Middle East* (UK: Penguin, 2012).

mereka untuk mencari sebanyak mungkin pasokan minyak. Dengan cadangan minyak yang melimpah, Barat berusaha memastikan bahwa Timur Tengah menjadi penyuplai utama kebutuhan mereka<sup>2</sup>.

Robert Kaplan, dalam analisisnya yang berkaitan dengan politik global dan pengaruh geografis, menunjukkan bahwa lokasi strategis menjadi dasar utama mengapa ilmuwan dan politisi harus terus memantau perkembangan di Timur Tengah. Dia juga menegaskan bahwa predikat wilayah ini sebagai tempat yang tidak pernah selesai melakukan transisi memperkuat urgensi untuk tetap waspada. Stabilitas menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai di wilayah ini<sup>3</sup>.

Di luar analisis mengenai faktor internal dan eksternal yang membentuk perkembangan politik di kawasan, penting untuk memahami negara-negara yang menjadi penentu stabilitas Timur Tengah. Arab Saudi, Iran, Irak, Mesir, dan Turki telah memainkan peran kunci dalam menentukan arah politik kawasan sepanjang sejarah. Arab Saudi, dengan keberhasilan ekonominya dan kepemilikan senjata yang besar, juga terpengaruh oleh hubungan dekatnya dengan Amerika Serikat. Meskipun Iran menghadapi tantangan embargo DK PBB, kekuatan militernya yang mumpuni dan sumber daya minyak serta gas yang melimpah menjadikan ekonomi Iran sebagai faktor penentu yang kuat. Irak, sejak era Sadam Hussein, digambarkan sebagai negara yang agresif dalam memperluas

---

<sup>2</sup> Simon Bromley, *Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development* (New York: Polity Press, 1993).

<sup>3</sup> Robert D. Kaplan, *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflict and the Battle Against Fate* (New York: Random House, 2013).



pengaruhnya melalui pendekatan militer. Namun, setelah perang Irak tahun 2003, negara ini mengalami penurunan pengaruh dan kekuatan karena kesulitan dalam melakukan konsolidasi di tingkat domestik dan mencari solusi untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang muncul pasca-perang Irak 2003.

Mesir, dalam berbagai peristiwa politik, telah berperan signifikan sebagai penggerak sentimen politik pan-Arabisme atau pencapaian di sektor ekonomi dan militer. Sampai hari ini, Mesir dianggap sebagai pihak yang penting untuk dilibatkan dalam upaya menciptakan stabilitas di kawasan, karena alasan geo-strategis yang membuat negara-negara Eropa dan Amerika berharap untuk berkerjasama militer dengan rezim Mesir. Sementara itu, Turki, meskipun tidak secara geografis terletak di zona tengah Timur Tengah, memiliki warisan sejarah yang signifikan dari era Ottoman di mana negara-negara Timur Tengah berada di bawah protektorat Sultan Ottoman di Istanbul. Dari perspektif saat ini, Turki merupakan salah satu negara dengan kekuatan militer paling dominan di kawasan ini dan menjadi satu-satunya negara Muslim yang menjadi anggota aliansi pertahanan NATO<sup>4</sup>.

Adapun tujuan suatu negara yang berambisi memiliki senjata nuklir adalah untuk mencapai rasa aman dan sekaligus menunjukkan kekuatan kepada pihak lain. Pemilikan senjata nuklir diharapkan dapat memberikan

---

<sup>4</sup> M. S. R Rofii, "Babak Baru Nuklir Iran: Memahami Manuver Iran Dan Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah," *Journal of Integrative International Relations* 1, no. 1 (2015): 27–39.

negara tersebut rasa hormat dari tetangganya, yang dikenal dalam konteks keamanan sebagai "*deterrence*." Selain itu, alasan lainnya untuk memiliki senjata nuklir adalah untuk keperluan damai, mengingat kebutuhan akan energi semakin meningkat seiring dengan gencarnya produksi listrik dalam negara-negara berkembang. Dalam fase industrialisasi, menjadi suatu kebijakan yang wajar bagi negara untuk mencari sumber daya listrik sebanyak mungkin.

Lembaga internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah memberikan pedoman kepada negara-negara di seluruh dunia untuk menempatkan perdamaian sebagai prioritas utama. Mereka juga telah mengajak negara-negara untuk ikut serta dalam perjanjian non-proliferasi nuklir yang dikenal sebagai "*Non-Proliferation Treaty (NPT)*." Dalam perjanjian ini, setiap negara yang menandatangani diberikan hak untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk keperluan damai, seperti penyediaan energi listrik, penelitian teknologi kesehatan, dan produk lain yang tidak berhubungan dengan senjata. Negara yang terikat oleh perjanjian ini diharapkan untuk transparan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan nuklir, termasuk memberikan akses kepada lembaga peninjau International Atomic Energy Agency (IAEA)<sup>5</sup>.

Iran merupakan salah satu negara yang memiliki program nuklir yang canggih dan cepat. Namun Program tersebut telah menjadi sumber

---

<sup>5</sup> M. S Rofii, "Membayangkan Dunia Tanpa Senjata Nuklir: NPT Dan Post-Agreement Negotiation," *Jurnal Multiversa* 1, no. 2 (2010).

konflik dan ketegangan internasional selama bertahun-tahun<sup>6</sup>. Pada awalnya, program ini dimulai pada era 2000an dengan klaim Iran bahwa tujuan pengembangan teknologi nuklir adalah untuk keperluan energi sipil. Namun, kekhawatiran muncul di kalangan negara-negara Barat dan Amerika Serikat bahwa Iran dapat menggunakan teknologi ini untuk pengembangan senjata nuklir, mengingat sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh Iran di bawah kerangka program nuklirnya.

Ketegangan semakin meningkat ketika negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, bersama dengan Uni Eropa, memulai serangkaian sanksi ekonomi terhadap Iran guna membatasi dan menekan program nuklirnya. Sanksi tersebut meliputi pembatasan perdagangan minyak, sektor keuangan, dan perdagangan dengan tujuan memaksa Iran untuk mengurangi aktivitas nuklirnya<sup>7</sup>.

Upaya diplomasi dilakukan melalui serangkaian perundingan yang melibatkan negara-negara anggota PBB serta organisasi internasional lainnya. Namun, perundingan ini seringkali tidak mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Pada tahun 2015, Iran bersama dengan enam kekuatan dunia (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, dan Jerman) mencapai kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA). Kesepakatan ini bertujuan untuk mengontrol program nuklir Iran dengan membatasi kapasitas nuklirnya

---

<sup>6</sup> Shahram Chubin, *Iran's Nuclear Ambitions* (Washington DC: Carnegie Endowment For International Peace, 2006).

<sup>7</sup> Daniel H Joyner, *Iran's Nuclear Program and International Law* (America: Oxford, 2016).

dalam pertukaran untuk pengurangan sanksi ekonomi yang diberlakukan terhadap Iran<sup>8</sup>.

Terciptanya JCPOA tentu memicu beragam reaksi dari berbagai pihak. Beberapa negara dan organisasi menyambut kesepakatan ini sebagai langkah besar dalam menjaga stabilitas global dan mengurangi ancaman nuklir. Sementara yang lain, mempertanyakan keberlanjutan dan mempertanyakan komitmen Iran untuk mematuhi. Meskipun demikian, JCPOA memberikan banyak manfaat untuk Iran, diantaranya: *Pertama*, menghilangkan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh pihak internasional terhadap Iran akan dicabut setelah Iran mematuhi komitmennya dalam JCPOA. Ini membuka jalan bagi Iran untuk memperluas hubungan ekonominya dengan dunia dan memperoleh manfaat dari perdagangan bebas. *Kedua*, membatasi program nuklir. JCPOA membatasi program nuklir Iran dan memastikan bahwa program tersebut digunakan untuk tujuan damai saja. Ini membantu mengurangi kekhawatiran dunia terhadap program nuklir Iran dan memperkuat stabilitas regional. *Ketiga*, memperkuat hubungan dengan dunia internasional. JCPOA membantu memperkuat hubungan Iran dengan dunia internasional dan membuka jalan bagi negara untuk terlibat dalam aktivitas global. *Keempat*, meningkatkan stabilitas regional. JCPOA membantu meningkatkan stabilitas regional dan memperkuat perdamaian dan keamanan di kawasan.

---

<sup>8</sup> Mark Fitzpatrick, "Assessing the JCPOA," Adelphi Series 57, no. 466–467 (March 4, 2019): 19–60.

*Kelima*, menjaga program nuklir untuk tujuan damai. JCPOA memastikan bahwa program nuklir Iran digunakan untuk tujuan damai saja dan membantu menjaga stabilitas regional.<sup>9</sup>

Namun setelah 4 tahun berjalan, Iran mulai melanggar beberapa komitmen yang tercantum dalam JCPOA pada tahun 2019, setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut dan menerapkan sanksi ekonomi baru. Iran melalui Presiden Hassan Rouhani menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh kesepakatan ini, karena pihak-pihak internasional tidak memenuhi komitmen mereka untuk memastikan bahwa Iran memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari kesepakatan. Adapun langkah-langkah yang diambil Iran, meliputi: *Pertama*, menambah stok uranium yang terdapat di bawah batas yang ditentukan dalam JCPOA. *Kedua*, menambah tingkat penguraian uranium. *Ketiga*, memulai operasi *centrifuge* baru. *Keempat*, mengumumkan rencana untuk membangun fasilitas nuklir baru. *Kelima*, mengumumkan rencana untuk memperluas program nuklir Iran<sup>10</sup>.

Menurut Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, pada dasarnya Iran masih bertekad untuk memenuhi komitmen mereka dalam kesepakatan dan berharap bahwa pihak-pihak internasional akan memenuhi komitmen mereka juga. Ia juga menegaskan bahwa tindakan Iran semacam

---

<sup>9</sup> Abdullah Abdullah, "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati JCPOA Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani," Jurnal ICMES 5, no. 1 (2021): 1–21.

<sup>10</sup> "Iran's Breaches of the Nuclear Deal | The Iran Primer," diakses melalui <https://iranprimer.usip.org/blog/2019/oct/02/iran%E2%80%99s-breaches-nuclear-deal>, tanggal 27 Agustus 2023, pukul 08:00 WIB.

itu tidak bertujuan untuk menimbulkan konflik baru atau membahayakan stabilitas regional dan keamanan nuklir, melainkan menjalankan apa yang sudah diatur dalam paragraf 36 JCPOA.

Berdasarkan peristiwa tersebut, tesis ini akan mendiskusikan alasan Iran melanggar JCPOA dengan fokus perhatian pada proses pengambilan keputusan. Fokus ini dipilih dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait pelanggaran Iran terhadap JCPOA. Dalam beberapa kajian sebelumnya, para peneliti memang telah mendiskusikan persoalan tersebut dengan berbagai fokus. Beberapa peneliti ada yang memandang alasan utama Iran melanggar JCPOA adalah karena kebijakan Presiden Donald Trump. Sejak masa pemerintahannya, Trump membuat kebijakan yang sangat keras terhadap Iran, termasuk membatalkan partisipasi AS dalam kesepakatan nuklir Iran dan memperkenalkan sanksi ekonomi yang sangat ketat.<sup>11</sup> Tindakan ini membuat Iran merasa bahwa mereka tidak lagi memperoleh manfaat yang layak dari kesepakatan dan bahwa pihak-pihak internasional tidak memenuhi komitmen mereka. Oleh karena itu, Iran memutuskan untuk mengurangi kepatuhan mereka terhadap kesepakatan dan mulai meningkatkan aktivitas nuklir mereka. Namun, tindakan Iran ini bukanlah tindakan yang tiba-tiba. Sejak Trump membatalkan partisipasi AS dalam kesepakatan, Iran telah mengambil tindakan bertahap untuk mengurangi kepatuhan mereka dan

---

<sup>11</sup> Paulina Matera and Rafał Matera, "Why Does Cooperation Work or Fail? The Case of EU-US Sanction Policy against Iran," *Croatian International Relations Review* 25, no. 85 (November 18, 2019): 29–62.

memperingatkan pihak-pihak internasional bahwa mereka akan melakukan lebih banyak jika komitmen internasional tidak dipenuhi.

Sebagian peneliti lainnya memandang alasan Iran melanggar JCPOA adalah kondisi ekonomi yang buruk.<sup>12</sup> Sejak kesepakatan ditandatangani, Iran berharap untuk memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari membatasi aktivitas nuklir mereka. Namun, sanksi ekonomi yang tetap berlaku membuat sulit bagi Iran untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari kesepakatan. Kondisi ekonomi yang buruk memicu tekanan dari dalam negeri, seperti tingginya tingkat pengangguran dan inflasi, dan membuat pemerintah Iran merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasi. Oleh karena itu, Iran memutuskan untuk mengurangi kepatuhan mereka terhadap kesepakatan dan mulai meningkatkan aktivitas nuklir mereka untuk memperkuat posisi mereka dan memperoleh manfaat yang layak.

Berdasarkan dua faktor di atas, penulis berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut belum memberi jawaban yang memuaskan. Jika kebijakan Donald Trump adalah satu-satunya penyebab Iran melanggar JCPOA tentu saja ini sulit dipahami. Pada dasarnya persoalan tersebut dapat terselesaikan, apabila Uni Eropa dapat melindungi atau membantu Iran untuk menghadapi sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan Uni Eropa untuk mengatasi sanksi ekonomi

---

<sup>12</sup> Peter Brookes, Brett D. Schaefer, and James Phillips, "No Iran Nuclear Deal: Next Steps," *The Heritage Foundation*, no. 5030 (2020): 1–9.

Amerika Serikat: *Pertama*, menciptakan *Instrument in Support of Trade Exchanges* (INSTEX). Uni Eropa membentuk INSTEX untuk memfasilitasi perdagangan antara Uni Eropa dan Iran tanpa pengaruh oleh sanksi Amerika Serikat.

*Kedua*, menolak sanksi Amerika Serikat. Uni Eropa memastikan bahwa perusahaan-perusahaan dan bank-bank Uni Eropa tidak terkena sanksi Amerika Serikat jika mereka terlibat dalam bisnis dengan Iran. *Ketiga*, mempertahankan komitmen terhadap JCPOA. Uni Eropa mempertahankan komitmennya terhadap JCPOA dan berusaha untuk memastikan bahwa Iran dapat memperoleh manfaat dari kesepakatan meskipun menerima sanksi dari Amerika Serikat. *Keempat*, berkoordinasi dengan negara-negara lain. Uni Eropa berkoordinasi dengan negara-negara lain yang terlibat dalam JCPOA, termasuk Iran dan negara-negara lain di Timur Tengah, untuk mencari solusi yang memadai terkait dengan sanksi ekonomi Amerika Serikat.<sup>13</sup> Namun dari semua hal yang dilakukan Uni Eropa tersebut, Iran belum merasa cukup dilindungi atau bahkan menganggap Uni Eropa gagal meyakinkan Iran dapat memperoleh manfaat dari kesepakatan tersebut.<sup>14</sup>

Selain kebijakan Amerika Serikat, alasan Iran melanggar JCPOA karena kondisi ekonomi Iran, juga kurang begitu menjelaskan. Memang

---

<sup>13</sup> Frances Coppola, "Europe Circumvents U.S. Sanctions On Iran," Forbes, 2019, diakses melalui <https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2019/06/30/europe-circumvents-u-s-sanctions-on-iran/?sh=3ac290e72c8d>, tanggal 28 Agustus 2023, pukul 09:00 WIB.

<sup>14</sup> "Iran's Breaches of the Nuclear Deal | The Iran Primer."



sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat mempengaruhi sektor-sektor utama ekonomi Iran, seperti minyak, bank, serta peralatan militer. Namun setelah itu, Iran dapat kembali meningkatkan kondisi ekonominya meskipun sanksi tersebut belum dicabut. Pada tahun 2020, pertumbuhan GDP Iran menunjukkan +3.4% yang sebelumnya -6.8% pada tahun 2019<sup>15</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa Iran mampu membangkitkan kondisi ekonominya dengan cepat.

Melanjutkan diskusi sebelumnya, tesis ini akan menambahkan pemahaman baru terkait alasan Iran melanggar JCPOA. Dalam menganalisis persoalan ini, penulis menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri menurut Richard C. Snyder, H.W Bruck dan Burt Sapin. Menurutnya, proses pengambilan keputusan luar negeri itu sifatnya kompleks dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Artinya, suatu negara perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang turut andil dalam pengambilan suatu kebijakan baik dari internal maupun eksternalnya<sup>16</sup>. Berdasarkan pandangan ini, penulis berpendapat bahwa ada beberapa alasan penting lainnya yang belum dijelaskan oleh para penelitian terdahulu terkait alasan Iran melanggar JCPOA, seperti tekanan politik, dan kegagalan Uni Eropa. Namun sebelum mendiskusikan persoalan tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu faktor Iran menandatangani JCPOA.

---

<sup>15</sup> Henry Rome, "Iran in 2021: The Economy," *The Iran Primer*, 2021.

<sup>16</sup> Richard C Snyder, H.W Bruck, and Burton Sapin, *Foreign Policy Decision Making*, ed. Valerie M Hudson, Derek H Chollet, and James M Goldgeier, Revisited (New York: Palgrave Macmillan, 2002).

Kemudian, penulis juga akan menjelaskan bagaimana implementasi Iran terhadap JCPOA dari sejak penandatanganan sampai pada pelanggaran.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan penelitian ini adalah:

1. Mengapa Iran menandatangani kesepakatan JCPOA?
2. Bagaimana implementasi Iran terhadap kesepakatan JCPOA pada tahun 2015-2019?
3. Mengapa Iran melanggar kesepakatan JCPOA pada tahun 2019?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tesis ini memiliki tiga tujuan, yakni:

1. Mengetahui faktor Iran menandatangani kesepakatan JCPOA
2. Mengetahui kepatuhan Iran terhadap kesepakatan JCPOA dari sejak penandatanganan sampai deklarasi Presiden Hassan Rouhani pada Juli 2019
4. Mengetahui alasan keputusan Iran melanggar kesepakatan JCPOA pada tahun 2019

## **D. Kajian Pustaka**

Sebelum menemukan fokus kajian, penulis terlebih dahulu melacak, menelaah, dan memetakan beberapa penelitian yang memiliki tema diskusi mirip dengan tesis ini, yaitu faktor Iran menandatangani JCPOA, implementasi, dan pelanggaran. Berkaitan dengan faktor Iran menandatangani JCPOA, penulis menemukan ada beberapa peneliti yang sudah menjelaskan persoalan tersebut secara komprehensif, yakni

Abdullah<sup>17</sup>, Seyed Hossein Mousavian dan Mohammad Mehdi Mousavian<sup>18</sup>. Mereka menjelaskan bahwa ada tiga aspek yang mempengaruhi Iran menandatangani JCPOA.

*Pertama*, aspek ekonomi. Iran ingin meredakan sanksi ekonomi yang diterapkan oleh beberapa negara besar dan badan internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Sanksi ini sangat mempengaruhi sektor-sektor penting seperti minyak, bank, dan industri. Selain itu, Iran juga berharap bahwa dengan menandatangani JCPOA, mereka dapat memperluas bisnis dan investasi dengan negara-negara lain dan memperkuat ekonomi mereka.

*Kedua*, aspek politik. Iran ingin memperbaiki hubungan diplomatik dan ekonomi mereka dengan dunia internasional dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu aktor utama di wilayah Timur Tengah. Selain itu, Iran juga berharap bahwa dengan menandatangani JCPOA, mereka dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi dengan dunia internasional dan membuktikan bahwa program nuklir mereka tidak bertujuan untuk tujuan nuklir.

*Ketiga*, aspek keamanan. Iran ingin mempertahankan program nuklir mereka sebagai bagian dari hak internasional mereka dan memastikan bahwa program tersebut tidak digunakan untuk tujuan militer.

---

<sup>17</sup> Abdullah, "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Menyetujui JCPOA Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani."

<sup>18</sup> Seyed Hossein Mousavian and Mohammad Mehdi Mousavian, "Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security," *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 1, no. 1 (2018): 1–39, <https://doi.org/10.1080/25751654.2017.1420373>.

Selain itu, Iran juga berharap bahwa pembatalan sanksi dan peningkatan hubungan diplomatik akan membantu meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.

Sedangkan berkaitan dengan implementasi Iran terhadap JCPOA, penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Emily Landau, Ephraim Asculai, dan Shimon Stein<sup>19</sup>; By Richard Nephew<sup>20</sup>; Sir Richard Dalton<sup>21</sup>, mereka menjelaskan tentang bagaimana Iran mengimplementasikan JCPOA. Pada tahun 2015-2016, Iran secara tegas mematuhi kewajibannya berdasarkan JCPOA. Iran melakukan serangkaian tindakan untuk membatasi program nuklirnya dan memenuhi syarat-syarat perjanjian, seperti membatasi jumlah sentrifuge dan mengurangi stok uranium, serta menerima inspeksi dari IAEA. Dalam pertukaran, sanksi ekonomi yang diterapkan terhadap Iran oleh PBB, Uni Eropa, dan negara-negara lain mulai dicabut atau diringankan. Implementasi Iran terhadap JCPOA pada tahun 2015-2016 dianggap berhasil oleh para pihak yang terlibat, dan perjanjian ini diakui sebagai salah satu contoh sukses dari diplomasi nuklir.

Selain itu, terkait alasan Iran melanggar JCPOA, ada beberapa peneliti yang mengkaji persoalan tersebut, seperti yang dilakukan oleh Peter

---

<sup>19</sup> Emily Landau, Ephraim Asculai, and Shimon Stein, "One Year to Implementation of the JCPOA: Assessing the Nuclear Deal in Context," *CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY*, 2016, 19–32.

<sup>20</sup> Richard Nephew, "Six Months Later: Assessing the Implementation of the Iran Nuclear Deal," *CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY*, 2016, 1–22.

<sup>21</sup> Sir Richard Dalton, "The Iran Nuclear Negotiations: One Year On," *Asian Affairs* 47, no. 3 (2016): 351–65.

Brookes, Brett D. Schaefer, and James Phillip<sup>22</sup>; Faramarz Yadegarian<sup>23</sup>; dan Afrizal<sup>24</sup>. Para peneliti tersebut menjelaskan bahwa Iran melanggar JCPOA pada tahun 2019 setelah Amerika Serikat mengakhiri keikutsertaannya dalam perjanjian tersebut pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksi yang sangat keras terhadap Iran. Ini membuat Iran merasa tidak diakui dan merasa tertekan secara ekonomi. Akibatnya, Iran memulai serangkaian tindakan untuk memperluas aktivitas nuklirnya yang dilarang dalam perjanjian, seperti meningkatkan produksi uranium dan mengurangi kepatuhan terhadap batas-batas perjanjian. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap sanksi yang diterapkan dan untuk memperkuat posisi Iran dalam negosiasi ulang dengan pihak-pihak yang terlibat dalam JCPOA.

Berdasarkan penelusuran terhadap kajian penelitian-penelitian terdahulu, penulis merasa bahwa masih ada ruang kosong yang belum dibahas. *Pertama*, faktor Iran menandatangani JCPOA memang sudah dijelaskan secara komprehensif, namun poin-poin yang dijelaskan cenderung bias. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman yang lebih detail terkait persoalan tersebut. *Kedua*, sejauh pengamatan penulis, penulis hanya menemukan implementasi Iran terhadap JCPOA pada satu tahun pertama pelaksanaan dan belum ada peneliti lain yang mendiskusikan dari awal

---

<sup>22</sup> Peter Brookes, Brett D. Schaefer, and James Phillips, "Iran Nuclear Deal: Next Steps," *The Heritage Foundation*, no. 5030 (2020): 1–9.

<sup>23</sup> Faramarz Yadegarian, "Iran's Countermeasures to US Withdrawal from JCPOA and the Trigger Mechanism," *Iranian Review for UN Studies* 2, no. 2 (2019): 89–110.

<sup>24</sup> Afrizal, "Strategi Iran Pasca Amerika Serikat Keluar Dari Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Tahun 2018-2020," *JOM FISIP* 8, no. 2 (2021): 1–15.

penandatanganan sampai pada pelanggaran Iran. *Ketiga*, memang sudah ada sebagian penelitian yang mendiskusikan alasan Iran melanggar JCPOA. hanya saja, fokus perhatiannya masih terpusat pada faktor keluarnya Amerika Serikat dan sanksi ekonomi. Sedangkan dalam tesis ini, fokus studi akan diarahkan pada penjelajahan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Iran dalam pengambilan kebijakan tersebut.

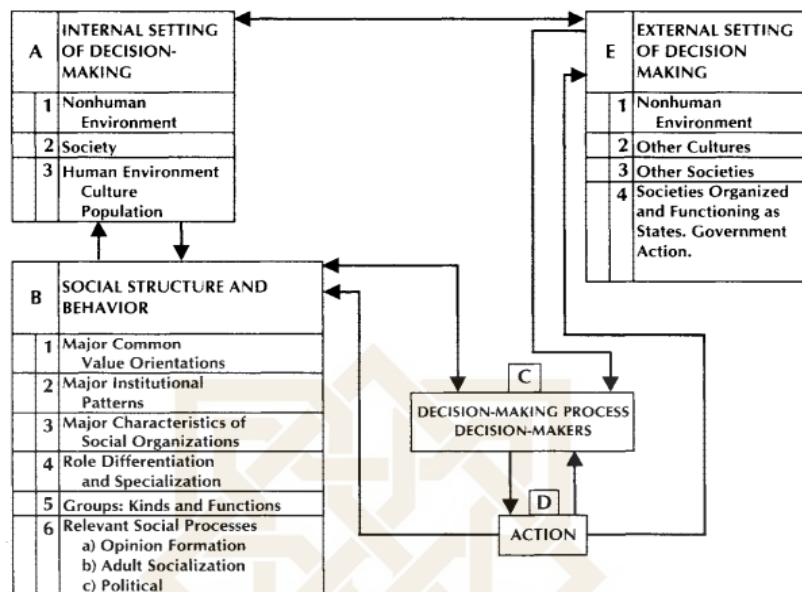
#### **E. Kerangka Teoritis**

Untuk menganalisis alasan Iran melanggar JCPOA, penulis menggunakan teori *Decision Making Process* dari Richard C Snyder, H.W Bruck, dan Burton Sapin. Menurut penulis, teori ini sangat relevan untuk menganalisis alasan Iran melanggar JCPOA, karena bisa membantu menjelaskan bagaimana keputusan politik luar negeri Iran terkait JCPOA dicapai dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, teori ini bisa memberikan pandangan yang komprehensif dan holistik terhadap kondisi dan situasi yang mempengaruhi kebijakan Iran dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi implementasi JCPOA. Berikut skema yang ditawarkan oleh Richard C Snyder, H.W Bruck, dan Burton Sapin<sup>25</sup>:

**Gambar 1: Teori *Decision Making Process***

---

<sup>25</sup> Snyder, Bruck, and Sapin, *Foreign Policy Decision Making*.



Sumber: *foreign Policy Decision Making*

Dari gambar diatas, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan suatu negara tentu tidak lepas dari variabel utamanya yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang datang dari dalam atau domestik negara itu sendiri, yang meliputi: *Pertama, Non-Human Enviromen* merupakan faktor lingkungan yang tidak berkaitan dengan manusia, seperti budaya, letak geografis, sumber daya atau kondisi perekonomian suatu negara. *Kedua, Society* merupakan opini masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat berpengaruh terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah. *Ketiga, Human Enviroment, Culture, Population* terkait tentang lingkungan manusia, kebudayaan, dan populasi suatu negara. Para *decision*

*makers* memiliki nilai-nilai budaya yang tumbuh sejak ia tinggal di negara tersebut.<sup>26</sup>

Selain faktor internal, terdapat juga *social structure and behavior* yang mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara, antara lain: *Pertama, Major Common Value Orientation* merupakan nilai yang berkembang begitu pesat di masyarakat. *Kedua, Role of Differentiation and Specialization* merupakan nilai yang berkembang di tengah masyarakat dan menyebabkan adanya spesialisasi peran. *Ketiga, Major Institutional* merupakan nilai yang dianut dalam sistem pemerintahan di suatu negara. *Keempat, Major Characteristic of Social Organization* merupakan karakter nilai yang melekat pada banyak organisasi di suatu negara. *Kelima, Groups: Kinds and Functions* merupakan kelompok kepentingan yang memiliki daya tawar yang sangat tinggi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. *Keenam, Relevant Social Processes*, yang terdiri dari 2 hal, antara lain: *Opinion Formation, Adult Socialization*, dan *Political*<sup>27</sup>.

Selain dua hal yang disebutkan diatas, pengambilan keputusan suatu negara juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar negaranya atau kondisi di luar teritorial wilayah negara, antara lain: *Pertama, Non-Human Enviroment* adalah faktor lingkungan non manusia yang dapat mempengaruhi pembuat

---

<sup>26</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, "KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT PEMBATAAN EKSPOR MINYAK MENTAH TAHUN 2015" (Universitas Jember, 2017), hal 14.

<sup>27</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, "KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT PEMBATAAN EKSPOR MINYAK MENTAH TAHUN 2015", hal 14-15.



kebijakan yang berasal dari luar batas wilayah suatu negara berupa letak geografis atau kondisi ekonomi suatu negara. *Kedua, Other Cultures* merupakan faktor yang turut mempengaruhi perumusan kebijakan yang berasal dari budaya lain. *Ketiga, Other Societies* merupakan faktor yang berupa opini kelompok masyarakat yang berada di luar negeri dan dapat menjadi pertimbangan *decision makers* dalam merumuskan kebijakan. *Keempat, Societies Organized and Functioning as States and Government Action* merupakan tindakan suatu negara terhadap negara lain, dimana tindakan tersebut menjadi bahan pertimbangan negara lain<sup>28</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menemukan ada empat faktor yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan terkait alasan Iran melanggar JCPOA, yakni: *Pertama, NonHuman Environment* atau yang dimaksud adalah kondisi ekonomi Iran. Berdasarkan data IMF, GDP Iran pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tajam yakni sekitar -4.8%. Kemudian di perparah pada tahun 2019 yakni sebesar -9.5%<sup>29</sup>. Hal ini terjadi akibat dari sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Sanksi ini meliputi pembatasan terhadap ekspor minyak Iran, yang merupakan sumber utama pendapat negara, serta pembatasan akses Iran terhadap sistem keuangan internasional. akibatnya nilai tukar rupiah Iran

---

<sup>28</sup> Mirna Ardiyanti Pratama, "KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT PEMBATAHAN EKSPOR MINYAK MENTAH TAHUN 2015", hal 17.

<sup>29</sup> Felix Richarter, "Chart: Iran's Economic Woes | Statista," diakses melalui <https://www.statista.com/chart/20454/real-gdp-growth-of-iran/>, tanggal 23 Agustus 2023, pukul 10:00 WIB.

terdepresiasi, inflasi meningkat, tingkat pengangguran meningkat, serta beberapa perusahaan dan sektor industri mengalami kesulitan.

*Kedua, Society* atau opini masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Iran memiliki kubu konservatif yang sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Terlihat sejak terbentuknya JCPOA, kubu ini merupakan kelompok penentang keras perdamaian nuklir dengan negara-negara Barat<sup>30</sup>. Mereka beranggapan bahwa perjanjian ini tidak memberikan manfaat yang cukup bagi Iran dan tidak ada jaminan sanksi ekonomi akan dicabut secara permanen. Mereka juga berasumsi bahwa negara-negara Barat juga masih memiliki pendekatan skeptis terhadap Iran. Dengan demikian, ketika kesepakatan JCPOA berada pada titik ketidakjelasan, kubu ini tentu akan kembali menguat dan mendukung Iran untuk melampaui batas kesepakatan.

*Ketiga, Government Action* atau yang dimaksud adalah kebijakan Donald Trump. Pada Mei 2018, Trump mendeklarasikan diri akan menarik AS secara sepihak dari kesepakatan nuklir. Ia memandang bahwa JCPOA merupakan kesepakatan yang tidak memberikan cukup manfaat terhadap AS dan hanya akan memperkuat posisi Iran. Tidak hanya itu, ia juga memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran sehingga menimbulkan

---

<sup>30</sup> Riezky Phoenna, Riezky Poetra Phoenna, and Harmiyati Harmiyati, "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Di Era Presiden Hassan Rouhani," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 20, no. 1 (November 8, 2018): 1–16.

beberapa kerugian<sup>31</sup>. Sanksi-sanksi tersebut meliputi: *Pertama*, sanksi minyak, yakni melarang perusahaan asing untuk berdagang minyak Iran dan membatasi akses Iran untuk pasa minyak global. *Kedua*, sanksi finansial, yakni melarang institusi keuangan dan perusahaan asing untuk berdagang dengan bank-bank sentral Iran dan membatasi akses Iran ke sistem keuangan global. *Ketiga*, sanksi industri, yakni melarang perusahaan asing untuk berdagang dengan sektor industri Iran, seperti pertambangan, pengolahan logam, dan teknologi tinggi. *Keempat*, sanksi individual, yang mencakup sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap merugikan AS, seperti pembiayaan terorisme atau program rudal Iran. Sanksi-sanksi tersebut, sangat mempengaruhi ekonomi Iran dan menimbulkan tekanan besar bagi pemerintah ataupun masyarakat Iran<sup>32</sup>.

*Keempat, Societies Organized* atau yang dimaksud adalah kebijakan dari Uni Eropa. Hal ini disampaikan secara terbuka oleh Presiden Hassan Rouhani dalam akun *twitternya*, bahwa Uni Eropa belum mampu memberikan solusi praktis untuk membantu Iran memperjuangkan hak

---

<sup>31</sup> Tiara Angela, "Konflik Amerika Serikat Dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA," Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO 1, no. 2 (November 10, 2021): 103–10.

<sup>32</sup> Dianne E Rennack, *The Effects of the JCPOA on the Iranian Economy* — American Iranian Council, Congressional Research Service, 2018, diakses melalui <http://www.us-iran.org/news/2017/4/15/the-effects-of-the-jcpoa-on-the-iranian-economy>, 20 Agustus 2023, pukul 11:00 WIB.

mereka dan memulihkan ekonomi mereka yang terpukul karena sanksi Amerika Serikat<sup>33</sup>.

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini ialah penelitian kualitatif, dengan studi kasus pelanggaran Iran terhadap JCPOA pada tahun 2019. Ada beberapa langkah yang penulis lakukan saat penelitian tesis ini, antara lain: *Pertama*, memetakan beberapa pertanyaan penelitian yang membahas tentang JCPOA. Kemudian, penulis cari dan temukan *research gap* yang sekiranya belum didiskusikan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Setelah itu, penulis kumpulkan beberapa data yang dibutuhkan dan untuk mendapatkannya, penulis melakukan penjelajahan ke berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dokumen, ataupun berita online yang pembahasannya relevan dengan tema diskusi penelitian ini, yakni alasan penandatanganan Iran, implementasi, serta pelanggaran terhadap kesepakatan JCPOA. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkolaborasi data dan penelitian sehingga dapat menghasilkan sebuah tulisan yang memiliki pembaharuan.

Setelah data-data tersebut terkumpul, penulis mulai melakukan *critical reading*, yaitu memahami, menganalisis, dan memilih informasi yang tepat untuk dijadikan sebagai bahan penulisan. Ketika analisis data selesai, tahap selanjutnya adalah membaginya kedalam beberapa variabel

---

<sup>33</sup> "Iran's Breaches of the Nuclear Deal," United State Institute of Peace, 2021, diakses melalui <https://iranprimer.usip.org/blog/2019/oct/02/iran's-breaches-nuclear-deal>, tanggal 21 Agustus 2023, pukul 12:00 WIB.

untuk memudahkan dalam menganalisis masalah dan jawaban pertanyaan dalam penelitian. Tahap terakhir, yakni menarasikan hasil analisis data yang telah dilakukan. Sehingga, hasil temuan penelitian mampu dibaca dan terepresentasikan dalam hasil penelitian yang detail dan dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini memiliki 5 bab pembahasan, antara lain:

Bab 1: pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: faktor Iran menandatangani JCPOA. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan tiga faktor penting yang meliputi perubahan kepemimpinan Iran, tekanan ekonomi, dan adanya dukungan dari negara-negara P5+1.

Bab III: implementasi Iran terhadap JCPOA. Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa hal, antara lain: latar belakang JCPOA, isi JCPOA, tantangan selama implementasi, dan peluang untuk meningkatkan kemampuan nuklir.

Bab IV analisis Iran melanggar JCPOA. Pada bab ini penulis akan menjelaskan empat faktor sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, yaitu kondisi ekonomi Iran pada tahun 2018-2019, dukungan masyarakat Iran, kebijakan Donald Trump terhadap JCPOA, serta kegagalan Uni Eropa melindungi Iran dari sanksi AS.

Bab V: penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Penulis akan menyimpulkan beberapa hal penting dari isi tesis ini dan memberikan saran kepada pembaca tentang pentingnya melanjutkan kajian ini ke arah yang lebih baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Faktor Iran menandatangani kesepakatan JCPOA tentu tidak lepas dari kondisi internal dan eksternalnya. Persoalan tersebut diawali sejak adanya perubahan kepemimpinan Iran pada tahun 2013, dari Presiden Mahmoud Ahamdinejad ke Presiden Hassan Rouhani. Keduanya menunjukkan perbedaan yang signifikan, baik dari gaya kepemimpinan, kebijakan, dan hubungan luar negeri, terutama mengenai persoalan nuklir. Pada masa Ahmadinejad, program nuklir Iran seringkali mendapat tekanan internasional dan beberapa kali Iran harus menerima sanksi ekonomi yang lebih ketat. Berbeda dengan Hassan Rouhani, ia lebih memilih memperbaiki hubungan dengan negara-negara Barat dan menganjurkan dialog untuk mengatasi persoalan nuklir, sehingga tercipta kesepakatan JCPOA.

Selain faktor diatas, masalah ekonomi Iran juga perlu diperhatikan. Pasca Ahmadinejad memimpin, kondisi ekonomi Iran menunjukkan keprihatinan, akibat sanksi dan embargo dari AS, UE, dan PBB yang menyebabkan tingginya angka inflasi, terbatasnya ekspor minyak, pengangguran meningkat, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengatasi persoalan tersebut, Hassan Rouhani melakukan perbaikan hubungan diplomatik terutama dengan AS dan sekutunya serta membawa

persoalan program nuklir Iran ke meja perundingan dengan syarat Iran dapat terbebas dari sanksi internasional.

Adapun faktor eksternalnya ialah adanya dukungan dari negara-negara P5+1. Perubahan kebijakan program nuklir Iran yang dilakukan oleh Presiden Hassan Rouhani, pada akhirnya disambut secara positif oleh negara-negara lain. Beberapa negara seperti AS, Perancis, Inggris, Cina, Rusia, dan Jerman menyetujui terbentuknya kesepakatan JCPOA, setelah resolusi-resolusi yang selama ini diterapkan tidak memecahkan persoalan tersebut.

Setelah kesepakatan JCPOA ditandatangani, Iran mengalami sejumlah tantangan dan peluang selama proses implementasi kesepakatan tersebut. *Pertama*, Beberapa sanksi ekonomi non nuklir masih tetap berlaku, seperti sanksi pelanggaran HAM, dukungan terhadap organisasi teroris, dan lain sebagainya. *Kedua*, Pergeseran Politik Amerika Serikat. Pada tahun 2018, Amerika Serikat keluar dari JCPOA di bawah administrasi Trump. Hal ini menyebabkan peningkatan sanksi AS terhadap Iran dan mengganggu pelaksanaan JCPOA.

Penarikan AS dari kesepakatan tersebut menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi Iran dan upaya-upaya mereka untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kesepakatan tersebut. Implikasinya, Iran secara terbuka mengumumkan akan mengurangi kepatuhannya terhadap kesepakatan tersebut secara bertahap. Hal ini dimulai dengan meningkatkan tingkat pengayaan uranium dari batas sebelumnya yakni 3,67% menjadi



4,5%. Kemudian, mulai menyuntikkan gas ke 1044 sentrifugal di Fordo dalam satu hari, dan masih banyak lagi. Menurut Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, tindakan yang diambil Iran tersebut bukanlah pelanggaran terhadap JCPOA, melainkan merupakan implementasi hak-hak yang telah diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa di paragraf 36 dari JCPOA itu sendiri.

Persoalan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini, yakni mengkaji lebih komprehensif tentang faktor Iran melanggar kesepakatan JCPOA. Dengan meminjam teori Richard C Snyder, H.W Bruck, dan Burton Sapin, penulis menemukan bahwa ada 4 faktor yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, baik secara internal maupun eksternal yang menyebabkan Iran melanggar kesepakatan tersebut, yaitu kondisi ekonomi, dukungan masyarakat, kebijakan Donald Trump, dan ketidakefektifan UE dalam menyelesaikan sanksi AS terhadap Iran.

## **B. Saran**

Tesis ini berusaha memahami secara lebih mendalam tentang faktor internal dan eksternal Iran melanggar kesepakatan JCPOA. Hanya saja, apa yang telah didiskusikan dalam tesis ini masih menyisakan banyak kekurangan fundamental yang perlu dielaborasi lebih mendalam, di antaranya: *Pertama*, hasil penelitian ini dapat dikatakan masih belum begitu representatif. *Kedua*, sumber data yang digunakan masih kurang lengkap, masih banyak hal yang belum tercantum dan dianalisis secara lebih

mendalam. Kelemahan ini terjadi salah satu faktor utamanya adalah keterbatasan waktu dan kemampuan saya dalam menulis tesis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad Fachri. "KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAN PASCA MUNDURNYA AMERIKA SERIKAT DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA)." Accessed November 29, 2023. <http://www.reuters.com/article/us-usa-trump->
- Abdullah, Abdullah. "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Menyepakati JCPOA Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani." *Jurnal ICMES* 5, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.91>.
- Adebahr, Cornelius. "The Linchpin to the Iran Deal's Future: Europe." *The Washington Quarterly* 38, no. 4 (October 2, 2016): 115–31. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2015.1125833>.
- Adiyudha, Christian, Setyasih Harini, and Halifa Haqqi. "DIPLOMASI MULTILATERAL IRAN DALAM UPAYA PENCABUTAN SANKSI DEWAN KEAMANAN PBB (Pada Masa Presiden Hassan Rouhani)." *Transformasi* 1, no. 30 (2016): 138–49. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/cived/article/viewFile/7921/6056>.
- Afrizal. "Strategi Iran Pasca Amerika Serikat Keluar Dari Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) Tahun 2018-2020." *JOM FISIP* 8, no. 2 (2021): 1–15.
- Ahmadi, Amir. "The Impact of Economic Sanctions and the JCPOA on Energy Sector of Iran." *Global Trade and Customs Journal* 13, no. 5 (2018): 198 – 223.
- . "The Impact of Economic Sanctions and the JCPOA on Energy Sector of Iran." *Global Trade and Customs Journal* 13, no. 5 (2018): 198–223. <https://doi.org/10.54648/GTCJ2018023>.
- Alamsyah, Riksa Nafis. "Kelanjutan Pengembangan Nuklir Iran Di Era Pemerintahan Baru Amerika Serikat." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 6, no. 2 (2022): 163–74. <https://doi.org/10.22303/pir.6.2.2022.163-174>.
- "Amerika Serikat Sasar Negara-Negara Pengimpor Minyak Iran - BBC News Indonesia." Accessed November 29, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48005119>.
- Angelia, Tiara. "Konflik Amerika Serikat Dan Iran Studi Kasus: Keluarnya Amerika Serikat Dari Perjanjian JCPOA." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO* 1, no. 2 (November 10, 2021): 103–10. <https://doi.org/10.31605/LINO>.
- Arms Control Association. "The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) at a Glance," 2022.
- Arms Control Association. "Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran, 1967-2023," January 2023.

- Astrov, V., Ghodsi, M., Grieveson, R., & Stehrer, R. "The Iranian Economy: Challenges and Opportunities." 2018.
- Bagheri, Mohsen, Mohammad Ali Basiri, and Enayatollah Yazdani. "Evaluating the Relationship between Hezbollah Lebanon's Discourse with the Islamic Revolution of Iran: A Critical Approach." *Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution* 4, no. 11 (March 1, 2022): 135–56. [https://jcrir.ut.ac.ir/article\\_86828.html](https://jcrir.ut.ac.ir/article_86828.html).
- Baiturohim, Makruf. "Implikasi Penarikan Diri Amerika Serikat Dari." *Dauliyah* 6, no. 2 (2021): 279–312.
- Bromley, Simon. *Rethinking Middle East Politics: State Formation and Development*. New York: Polity Press, 1993.
- Brookes, Peter, Brett D. Schaefer, and James Phillips. "Iran Nuclear Deal: Next Steps." *The Heritage Foundation*, no. 5030 (2020): 1–9.
- . "No Iran Nuclear Deal: Next Steps." *The Heritage Foundation*, no. 5030 (2020): 1–9.
- Burdah, Ibnu. *Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, Dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Chubin, Shahram. *Iran's Nuclear Ambitions*. Washington DC: Carnegie Endowment For International Peace, 2006.
- Coppola, Frances. "Europe Circumvents U.S. Sanctions On Iran." *Forbes*, 2019. <https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2019/06/30/europe-circumvents-u-s-sanctions-on-iran/?sh=3ac290e72c8d>.
- Cordesman, A. "America's Failed Strategy in the Middle East: Losing Iraq and the Gulf." *Csis, Center For Strategic A International Studies*, 2020.
- Dai, Hassan. "Hassan Rohani and Javad Zarif's Work Plan." *Ceased* 36, no. 1 (2014): 7–17. <https://doi.org/10.1080/10803920.2014.879518>.
- Dalton, Sir Richard. "The Iran Nuclear Negotiations: One Year On." *Asian Affairs* 47, no. 3 (2016): 351–65.
- DEMİR, Can. "The Antagonist Pro-Iranian Militias In The al-Hashd al-Shaabi As Sources Of Terror And Instability In Iraq." *The Journal of Defence and War Studies* 33, no. 1 (June 21, 2023): 33–64. <https://doi.org/10.54078/SAVSAD.1052161>.
- Dicky, R, Johar Pribadi, and Annisa Pratamasari. "Iran Nuclear Deal: The Role of Iranian Media and Public Opinion." *Airlangga Conference on International Relations*, 2018, 555–61. <https://doi.org/10.5220/0010280200002309>.
- European Union External Action. "THE JCPOA AND ITS IMPLEMENTATION," August 18, 2021.

- Finaldin, Tom, and Ilma Alfina Agustina. "KEPENTINGAN DAN PENGARUH KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) PADA 2018." *Global Mind* 2, no. 1 (October 23, 2020).  
<https://doi.org/10.53675/JGM.V2I1.77>.
- Fitzpatrick, Mark. "Assessing the JCPOA." *Adelphi Series* 57, no. 466–467 (2017): 19–60.  
<https://doi.org/10.1080/19445571.2017.1555914>.
- . "Assessing the JCPOA." *Adelphi Series* 57, no. 466–467 (March 4, 2019): 19–60.  
<https://doi.org/10.1080/19445571.2017.1555914>.
- Gallagher, Nancy, Ebrahim Mohseni, and Clay Ramsay. "Iranian Public Opinion under 'Maximum Pressure': A Public Opinion Study." *The Center for International and Security Studies at Maryland (CISSM)*, 2019, 1–42.  
[https://cisssm.umd.edu/sites/default/files/2019-10/Iranian PO under Maximum Pressure\\_101619\\_full.pdf](https://cisssm.umd.edu/sites/default/files/2019-10/Iranian%20PO%20under%20Maximum%20Pressure_101619_full.pdf).
- Ghods, Mahdi, Vasily Astrov, Richard Grieveson, and Robert Stehrer. *The Iranian Economy: Challenges and Opportunities*. Vienna Institute for International Economic Studies, 2018.
- Giumelli, Francesco. "Coercing, Constraining, Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War" 18, no. 2011 (2011): 2011–13.  
<https://research.rug.nl/en/publications/coercing-constraining-signalling-explaining-un-and-eu-sanctions-a>.
- Hendra Maujana Saragih. "Perubahan Arah Kebijakan Luar Negeri Iran Terhadap Amerika Serikat Dalam Program Nuklir Iran Pada Masa Pemerintahan Hassan Rouhani" Hendra Maujana Saragih Dosen Hubungan Internasional Universitas Nasional." *Jurnal Interdependence* 5, no. 1 (2017): 17–29.
- Hurst, Steven. "Obama and Iran: Explaining Policy Change." *The Obama Presidency and the Politics of Change*, 2017, 289–305. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-41033-3\\_13](https://doi.org/10.1007/978-3-319-41033-3_13).
- "IAEA and Iran - IAEA Board Reports," n.d.
- "Iran's Breaches of the Nuclear Deal | The Iran Primer." Accessed August 27, 2023.  
<https://iranprimer.usip.org/blog/2019/oct/02/iran%E2%80%99s-breaches-nuclear-deal>.
- Izewicz, Paulina. "The Iran Nuclear Deal Two Years on : Future Unclear and Getting Worse." *CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY*, 2018, 20–32.
- Joint Copenhensive Plan of Action*, diakses melalui <https://2009-2017.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/>
- Joyner, Daniel H. *Iran's Nuclear Program and International Law*. America: Oxford, 2016.

- Kaplan, Robert D. *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflict and the Battle Against Fate*. New York: Random House, 2013.
- Katzman, K., McInnis, K. J. "US-Iran Conflict and Implications for US Policy." *Congressional Research Service*, 2019.
- Kaya, Sezgin, and Zeynep Şartepe. "Contentious Politics in Iran: Factions, Foreign Policy and the Nuclear Deal." *ALTERNATIVES TURKISH JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS* 14, no. 3 (2015): 1–12. [www.alternativesjournal.net](http://www.alternativesjournal.net).
- Kelishomi, A. M., & Nisticò, R. "Employment Effects of Economic Sanctions in Iran." *World Development* 151 (2022).
- Kerr, P. K. "Iran's Nuclear Program: Status." *Current Politics and Economics of the Middle East* 9, no. 1 (2018): 151–250.
- Kerr, P. K., & Katzman, K. "Iran Nuclear Agreement and US Exit." *Congressional Research Service*, 2018.
- Kumer, Larry. "Stratfor: What the Iran Deal Means for Oil Prices." *Fabius Maximus Website*, 2015.
- Landau, Emily, Ephraim Asculai, and Shimon Stein. "One Year to Implementation of the JCPOA: Assessing the Nuclear Deal in Context." *CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY*, 2016, 19–32.
- Mahapatra, Chintamani. "US–Iran Nuclear Deal: Cohorts and Challenger." *Contemporary Review of the Middle East* 3, no. 1 (2016): 36–46.
- Mahdi, Imam. "ANALISA KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT, CINA, DAN RUSIA DALAM KESEPAKATAN NUKLIR IRAN." *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations* 1, no. 1 (August 10, 2016): 75–89. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.4609243>.
- Maioli, V. "The Future of the JCPOA: The Interests behind the 2015 Deal and Possible Strategies for a New Agreement," 2021.
- Matera, Paulina, and Rafał Matera. "Why Does Cooperation Work or Fail? The Case of EU-US Sanction Policy against Iran." *Croatian International Relations Review* 25, no. 85 (November 18, 2019): 29–62. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2019-0005>.
- Mehdi-Zadeh, Cyrus. "Iranian Economy Post-JCPOA and Its Ambitions." *Global Policy* 9, no. 1 (February 1, 2018): 153–55. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12535>.
- Menashri, David. "Hassan Rouhani: Iran's New Hope for Change." *Orient* 54, no. 4 (2013): 20–29.
- Mikail, Kiki. "IRAN DI TENGAH HEGEMONI BARAT (Studi Politik Luar Negeri Iran Pasca Revolusi 1979)." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam* 13, no. 2 (2013). <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/154>.

- Monshipouri, M., & Boggio, G. D. "Sanctions, Deterrence, Regime Change: A New Look at US-Iran Relations." *Middle East Policy* 29, no. 4 (2022): 26–44.
- Mousavian, Seyed Hossein, and Mohammad Mehdi Mousavian. "Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security." *Journal for Peace and Nuclear Disarmament* 1, no. 1 (2018): 1–39.  
<https://doi.org/10.1080/25751654.2017.1420373>.
- Nazareth, K. A. "Trump's Policy Towards Iran. ." *World Affairs: The Journal of International Issues* 23, no. 2 (2019): 22–35.
- Nephew, Richard. "Six Months Later: Assessing the Implementation of the Iran Nuclear Deal." *CENTER ON GLOBAL ENERGY POLICY*, 2016, 1–22.
- Osiewicz, Przemysław. "EU-Iran Relations in the Post-JCPOA Period: Selected Political Aspects." *Przegląd Politologiczny*, no. 2 (2018): 153–63.
- O'Sullivan, Meghan L. "Iran and the Great Sanctions Debate." *The Washington Quarterly* 33, no. 4 (2010): 7–21.
- Paramasatya, Satwika, and Sigit Wiranto. "Konfrontasi Amerika Serikat Dan Iran Dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)." *Jurnal Hubungan Internasional* 9, no. 2 (2019): 297–314.
- Paulraj, Nansi. "The JCPOA and Changing Dimensions of the Russia–Iran Relations." *Contemporary Review of the Middle East* 3, no. 1 (April 1, 2016): 95–110.  
<https://doi.org/10.1177/2347798916633294>.
- Permata Asi, Inda, Ahmad Jamaan, and Jurusan Hubungan Internasional. "RESPON IRAN TERHADAP KEBIJAKAN COERCIVE DIPLOMACY AMERIKA SERIKAT TERKAIT ISU NUKLIR." *JOM FISIP* 9. Accessed November 29, 2023.  
<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/view>.
- Phoenna, Riezky, Riezky Poetra Phoenna, and Harmiyati Harmiyati. "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Di Era Presiden Hassan Rouhani." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 20, no. 1 (November 8, 2018): 1–16.  
<https://doi.org/10.31315/paradigma.v20i1.2440>.
- Pratama, Mirna Ardiyanti. "KEPUTUSAN AMERIKA SERIKAT MENCABUT PEMBatasan EKSPOR MINYAK MENTAH TAHUN 2015." Universitas Jember, 2017.  
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/82740>.
- Rahim, M. H. "Post JCPOA." *ICMES* 3, no. 1 (2019): 27–52.
- Ramadan, T. *The Arab Awakening: Islam and the New Middle East*. UK: Penguin, 2012.
- Ramadhan, I., & Iskandar, J. A. "Upaya Perimbangan Kekuatan Iran-Arab Saudi Melalui Perang Suriah Untuk Memenangkan Kontestasi Geopolitik Di Timur Tengah." *Insignia: Journal of International Relations* 7, no. 2 (2020): 105–21.

- Ramadhan, Reza Bakhtiar. "Pengaruh Peningkatan Kekuatan Iran Terhadap Hegemoni Amerika Serikat Di Timur Tengah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 19, no. 1 (June 30, 2019): 111–26.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/4160>.
- Rennack, Dianne E. *The Effects of the JCPOA on the Iranian Economy — American Iranian Council. Congressional Research Service*, 2018. <http://www.us-iran.org/news/2017/4/15/the-effects-of-the-jcpoa-on-the-iranian-economy>.
- Richarter, Felix. "Chart: Iran's Economic Woes | Statista." Statista, 2020.  
<https://www.statista.com/chart/20454/real-gdp-growth-of-iran/>.
- Rofii, M. S. "Membayangkan Dunia Tanpa Senjata Nuklir: NPT Dan Post-Agreement Negotiation." *Jurnal Multiversa* 1, no. 2 (2010).
- Rofii, M. S. R. "Babak Baru Nuklir Iran: Memahami Manuver Iran Dan Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah." *Journal of Integrative International Relations* 1, no. 1 (2015): 27–39.
- Rome, Henry. "Iran in 2021: The Economy." *The Iran Primer*, 2021.
- . "Sanctions 1: Impact on Iran's Oil Exports." *The Iran Primer*, 2021.
- Sebenius, James K., and Michael K. Singh. "Is a Nuclear Deal with Iran Possible? An Analytical Framework for the Iran Nuclear Negotiations." *International Security* 37, no. 3 (January 1, 2013): 52–91. [https://doi.org/10.1162/ISEC\\_A\\_00108](https://doi.org/10.1162/ISEC_A_00108).
- "Seberapa Dalam Efek Sanksi AS Terhadap Iran?" Accessed November 29, 2023.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190430105659-4-69631/seberapa-dalam-efek-sanksi-as-terhadap-iran>.
- Shahrezaei, Fatemeh, Nozar Shafiee, Hussein Daheshiar, and hasan Shafiee. "Explanation of the Behavior of the European Union: Towards JCPOA." *Quarterly Journal of Political Research in Islamic World* 11, no. 3 (2021): 25–53. <http://priw.ir/article-1-1560-en.html>.
- Shirvani, Tara, and Siniša Vukovic. "After the Iran Nuclear Deal: Europe's Pain and Gain." *The Washington Quarterly* 38, no. 3 (July 3, 2015): 79–92.  
<https://doi.org/10.1080/0163660X.2015.1099026>.
- Situmorang, M. "Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 11, no. 1 (2015).
- Snyder, Richard C, H.W Bruck, and Burton Sapin. *Foreign Policy Decision Making*. Edited by Valerie M Hudson, Derek H Chollet, and James M Goldgeier. Revisited. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
- Sundari, R. "Wacana Program Nuklir Iran Sebagai Upaya Deterrence Terhadap Amerika Serikat ." Doctoral dissertation, Fakultas ISIPOL Jurusan Magister Ilmu Hubungan Internasional, 2019.



- Suzuki, Kazuto. "The Role and Effectiveness of UN Sanctions." *Taylor and Francis Group*, 2019, 178–99.
- Sya', M, and Roni Rofii. "Babak Baru Nuklir Iran: Memahami Manuver Iran Dan Dinamika Politik Kawasan Timur Tengah." *Journal of Integrative International Relations* 1, no. 1 (2015): 27–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4781732>.
- Syahrin, M. A. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.
- Tabrizi, A., & Santini, R. "EU Sanctions against Iran: New Wine in Old Bottles?" *ISPI Analysis* 97 (2012): 1–7.
- Tempo.co*. "Ini 3 Cara Iran Bertahan Dari Embargo Puluhan Tahun." 2019.
- The Iran Primer*. "Exiting the Deal Part 3: Iran Responds." 2018.
- The Iran Primer*. "Iran and the IAEA." 2022.
- The Iran Primer*. "Rouhani at the U.N." 2019.
- The Iran Primer*. "Rouhani Ultimatum on Nuclear Deal." 2019.
- The Iran Primer*. "Zarif in New York: On the Nuclear Deal." 2018.
- United State Institute of Peace. "Iran's Breaches of the Nuclear Deal," 2021. <https://iranprimer.usip.org/blog/2019/oct/02/iran's-breaches-nuclear-deal>.
- Vakil, S. "Iran on the Brink: Challenges & Opportunities for Washington." *Hoover Institution* 17 (2018): 1–16.
- Wambrau, Meyland S.F., and Mathius Apintamon. "Sanksi Ekonomi Amerika Serikat Terhadap Iran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)." *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 1, no. 1 (May 25, 2021): 56–72. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v1i1.1674>.
- "What Is the Iran Nuclear Deal? | Council on Foreign Relations." Accessed November 29, 2023. <https://www.cfr.org/backgrounder/what-iran-nuclear-deal>.
- Yadegarian, Faramarz. "Iran 's Countermeasures to US Withdrawal from JCPOA and the Trigger Mechanism." *Iranian Review for UN Studies* 2, no. 2 (2019): 89–110.
- Zed, Ali Bin, and Ratnawati. "Faktor-Faktor Pendorong Kemenangan Hassan Rouhani Dalam Pemilu Iran Juni 2013." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan* 17, no. 2 (2013): 60–65. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v17i2.2425>.